

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengembangan wilayah merupakan upaya mengharmoniskan sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Alih fungsi lahan basah untuk pengembangan wilayah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Hal ini dikarenakan lahan basah mempunyai fungsi penting dalam hidrologi sebagai daerah tangkapan air, sistem kontrol, pengatur fluktuasi banjir dan mencegah terjadinya penggaraman air (Rieley *et al.*, 1997). Pengembangan lahan basah di Indonesia tersebar di beberapa pulau, yaitu : Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Luas lahan basah Indonesia diperkirakan mencapai 33.393.570 hektar yang terdiri dari 20.096.800 hektar (60,2%) lahan pasang surut dan 13.296.770 hektar (39,8%) lahan rawa non-pasang surut (lebak). Dari luasan tersebut, total lahan rawa yang dikembangkan oleh pemerintah adalah 1,8 juta hektar dan oleh masyarakat sekitar 2,4 juta hektar (Dit. Rawa dan Pantai, Departemen PU, 2009 dalam Susanto, 2010).

Dalam konvensi Ramsar 1971, lahan basah didefinisikan sebagai wilayah rawa, lahan gambut dan perairan baik alami maupun buatan, permanen atau temporer (sementara), dengan air mengalir atau diam, tawar, payau atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah (surut) tidak melebihi 6 meter (Alegre dan Makarim, 1985). Lahan basah, dapat mencakup wilayah riparian (tepi sungai) dan pesisir yang berdekatan dengan suatu lahan basah, pulau-pulau atau bagian laut yang dalamnya lebih dari 6 meter yang terlingkupi oleh lahan basah. Lahan basah mempunyai fungsi hidrologi, vegetasi hidrofistik dan tanah hidrik (Cassel, 1997).

Pertumbuhan permukiman di lahan basah tidak dapat dihindari dikarenakan keterbatasan lahan kering dan semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Reklamasi lahan basah dilakukan untuk mendapatkan lahan baru yang digunakan sebagai kawasan permukiman, pertanian, perkebunan dan industri, akibat alih fungsi lahan basah secara besar-besaran akan menyebabkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan maupun manusia (Dugan, 1990; Farchan, 2008).

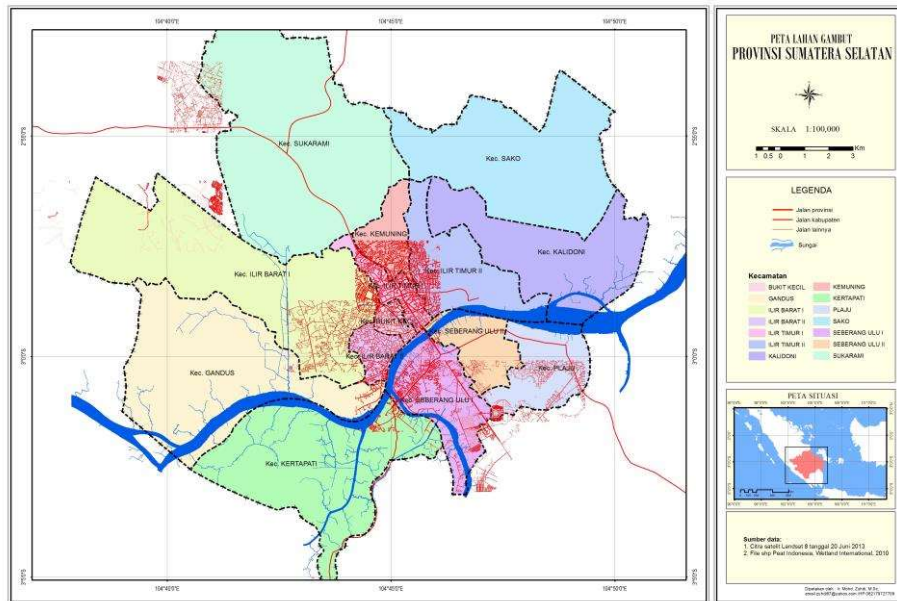
Kota Palembang secara administrasi merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini terletak di tepian Sungai Musi yang sangat lebar dan bisa dilayari

kapal-kapal besar. Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi dua bagian yaitu Seberang Ulu (24,28 %) dan Seberang Ilir (75,72%) . Sungai ini melintasi kota Palembang yang luasnya 400,61 km² sepanjang lebih kurang 20 km. Rata-rata ketinggian daratan di Kota Palembang adalah 5 meter di atas permukaan laut dengan topografi dataran rendah dan daerah rawa. Beberapa sungai yang lebih kecil juga banyak terdapat di kota ini. Dengan potensi fisik yang demikian maka kota Palembang mempunyai karakter sebagai kota air.

Sungai merupakan elemen fisik alami yang membentuk lansekap bumi selain daratan. Ruang sungai secara alami ditentukan oleh pola aliran airnya. Ruang sungai dan ruang daratan mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat. Dalam hal ini, air harus dipandang sebagai faktor pengarah dalam perencanaan tata ruang dan peruntukan lahan. Namun secara dinamis, air juga dipengaruhi oleh peruntukan lahan. Dengan demikian, kebijakan tentang lahan juga berpengaruh pada kebijakan tentang lingkungan air (Lusetyowati, 2006). Sungai merupakan tempat berawalnya peradaban. Sebagai sumber kehidupan, sungai bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Disamping untuk keseimbangan ekosistem alam, bagi manusia sungai bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk kegiatan perekonomian, transportasi, dan sebagainya. Begitu pentingnya keberadaan sungai membuat aktifitas sehari-hari penduduk yang tinggal di sekitarnya tidak terlepas dari sungai sehingga pada akhirnya terbentuk kebudayaan masyarakat di tepi sungai.

Seiring dengan modernisasi, peradaban di sekitar tepi sungai terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Pesatnya perkembangan yang terjadi, tak lain disebabkan oleh tingginya intensitas pertukaran informasi masyarakat antar daerah dengan beragam latar belakang. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi dan aktifitas penduduk pada tepi sungai, bahkan beberapa diantaranya tumbuh dan berkembang menjadi kota.

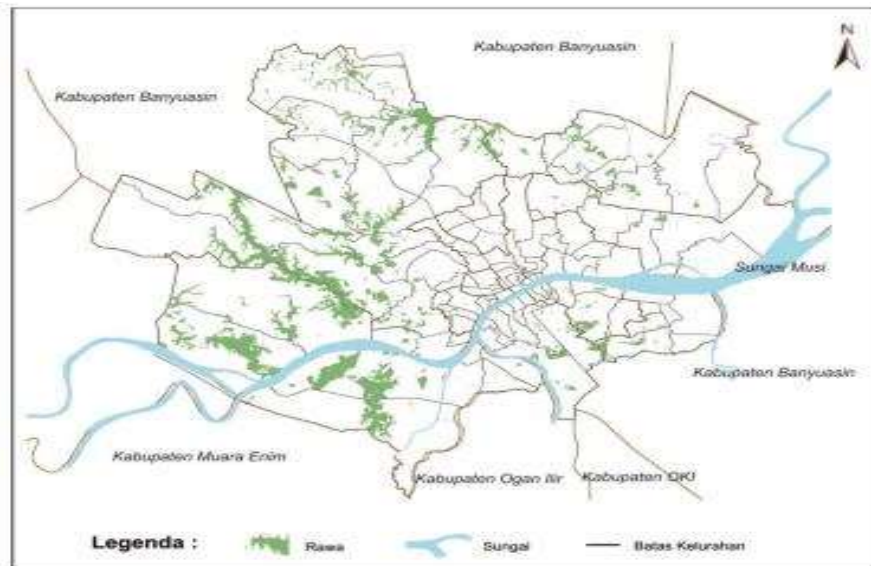
Kondisi fisik alamiah Palembang sebagian besar terdiri dari rawa (sekitar 52,28 %) dan sisanya berupa darat. Pada awalnya permukiman penduduk berada di tepian jalur transportasi utama yaitu sungai. Bentuk rumah-rumah di sini berupa rumah panggung atau rumah rakit yang mengikuti ketinggian pasang surut air. Kondisi rumah yang demikian ini sangat sesuai untuk daerah yang terpengaruh oleh pasang surut air.



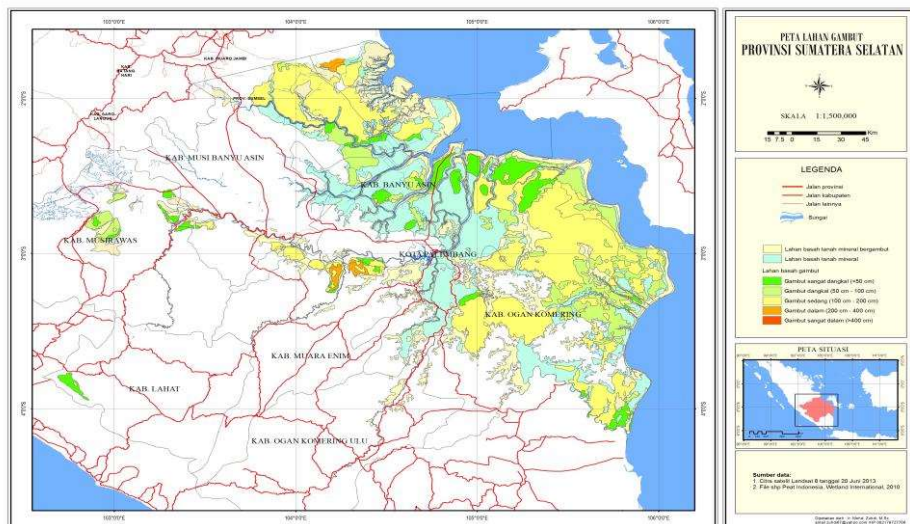
Gambar 1.1. Peta Kota Palembang (sumber: Palembang dalam Angka, 2015).

Pada daerah rawa, terutama di tepian sungai, rumah-rumah yang tumbuh berikutnya masih menggunakan bentuk rumah panggung, sebagai antisipasi terhadap pasang surut air. Rumah-rumah ini dihubungkan dengan jalur jalan di atas air yang disebut ‘jerambah’. Perkembangan permukiman seperti ini sangat cepat dan kemudian banyak memenuhi daerah-daerah rawa dan cenderung berubah menjadi kumuh. Perkembangan yang cepat ini juga disebabkan makin banyaknya pendatang dari sekitar Palembang (Sarwadi, 1997).

Permukiman di atas rawa mempunyai karakteristik yang unik karena sebagian besar aktifitas penduduknya dilakukan di atas air. Dengan kondisi yang demikian maka perilaku penduduknya akan terpengaruh dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya (Katz, 1994). Pola-pola perkembangan permukimannya juga mempunyai ciri khas tersendiri, karena merupakan perkampungan yang tumbuh secara alamiah tanpa mengadakan perubahan yang berarti pada lingkungan alamnya (rawanya tidak ditimbun). Sementara itu kebutuhan orang akan ruang kota dalam permukiman secara umum sama, baik pada daerah rawa maupun darat. Dalam batas-batas tertentu kebutuhan ini bisa terakomodasi walaupun terjadi penyesuaian.



Gambar 1.2. Peta sebaran rawa di Kota Sumatera Selatan (Sagala dkk, 2013).



Gambar 1.3. Peta Sebaran Lahan Gambut di Sumatera Selatan.

Keterbatasan lahan kering/ daratan untuk pemukiman menyebabkan penimbunan/ reklamasi pada lahan basah untuk mendapatkan lahan baru sebagai daerah pemukiman. Pengembangan lahan basah sebagai lahan pemukiman dilakukan pada daerah rawa-rawa, pesisir sungai/ pantai dan di daerah bergambut (Huda, 2013). Pengembangan lahan basah ini akan terus terjadi dan perkembangannya semakin cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Reklamasi lahan basah tentunya akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan maupun manusia ((Hanafiah, 1988; Yee, 2012). Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang pengembangan

kawasan permukiman di lahan basah sehingga sehingga dapat diketahui masalah/kendala pengembangan lahan basah sebagai lahan permukiman, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak yang ditimbulkan dan solusi/ pemecahan masalah serta arah riset untuk pengembangan lahan basah sebagai kawasan permukiman khususnya di daerah lahan basah tepian sungai di kota Palembang.

1.2. Perumusan Masalah

Lahan basah merupakan lahan marginal yang memiliki berbagai kendala fisik, biologis, sosial dan ekonomi sehingga pengembangannya memerlukan perencanaan dan penanganan yang cermat. Permukiman yang ada di tepi sungai akan ditata kembali dengan menggunakan 2 sistem utama, yaitu relokasi dan konsolidasi. Relokasi dilakukan pada rumah-rumah yang berada di atas badan sungai sehingga menutupi sempadan sungai. Sedangkan konsolidasi dilakukan untuk rumah-rumah yang berada di darat, namun lokasinya tidak mengganggu sempadan sungai.

Kawasan permukiman yang masih mempertahankan rawa sebagai lahan tempat berdirinya rumah / bangunan makin berkurang dan hanya terdapat di beberapa kawasan terutama di tepian sungai di mana pengaruh pasang surut air masih sangat terasa. Permukiman daerah rawa pada tepian sungai ini masih sangat penting untuk dipertahankan dengan bentuk semula, mengingat penimbunan rawa yang tidak mengikuti aturan bisa menimbulkan dampak yang cukup serius bagi kota Palembang. Pengembangan daerah rawa dengan cara reklamasi seperti yang sudah dilakukan perlu direncanakan secara skala makro (skala kota), karena dampak aliran air bisa mengakibatkan banjir.

Permukiman di kawasan lahan basah khususnya di daerah tepian Sungai Musi kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I menunjukkan rentan terhadap bahaya banjir, penurunan tanah dan sanitasi yang kurang memadai sehingga perlu dilakukan kajian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Analisis kesesuaian permukiman di lahan basah perlu dilakukan khususnya memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah, karena pada umumnya kawasan lahan basah mempunyai jenis tanah lunak yang cukup dalam sehingga perlu dikaji jenis fondasi yang sesuai agar konstruksi stabil tanpa mengalami penurunan tanah. Pembangunan permukiman berkelanjutan di kawasan lahan basah harus mempertimbangkan aspek kondisi fisik, sosial ekonomi dan faktor lingkungan.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan dalam laporan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis kondisi permukiman di lahan basah bila ditinjau dari aspek kondisi fisik/ teknik, sosial ekonomi dan lingkungan;
2. Memberi rekomendasi/ arahan dan saran pengembangan permukiman berkelanjutan di lahan basah.

1.4. Batasan Masalah

Agar kegiatan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di kawasan permukiman 8 Ulu dan sekitarnya;
2. Pengujian sifat fisik tanah berupa pengujian titik sondir untuk menentukan jenis dan kedalaman tanah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga laporan ini dalam satu satuan yang utuh dan runut, laporan ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang dijelaskan dalam Laporan Teknik ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan tentang metode penelitian yang dilakukan berupa observasi langsung ke lapangan dan wawancara dengan penduduk setempat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang resume, kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.